

Revitalizing Sami'na wa Atho'na: Strengthening Reasoned Obedience for Merdeka Belajar Character Education

Merevitalisasi Sami'na wa Atho'na: Memperkuat Ketaatan Beralasan untuk Pendidikan Karakter Merdeka Belajar

Rachmatullah Rusli

Universitas Pamulang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ dosen01198@unpam.ac.id

Keyword:

Enlightened Obedience; Merdeka Belajar; Profil Pelajar Pancasila; Character Education; Critical Compliance.

Kata Kunci:

Ketaatan Tercerahkan; Merdeka Belajar; Profil Pelajar Pancasila; Pendidikan Karakter; Kepatuhan Kritis.

Abstract

This study examines the integration of the Islamic pedagogical principle Sami'na wa Atho'na ("we hear and we obey") with Indonesia's Merdeka Belajar Curriculum to strengthen character education under the Profil Pelajar Pancasila framework. Through a qualitative descriptive approach, the research comprises three phases: a theological-literature review of Qur'anic and classical sources to map the spectrum of Sami'na wa Atho'na beyond passive obedience; ethnographic fieldwork in pesantren, madrasah, and Islamic schools to identify pedagogical manifestations and distortions; and a triangulation synthesis validated by experts via focus group discussions. Findings reconceptualize Sami'na wa Atho'na as "enlightened obedience," a meta-competency foundational to disciplined autonomy, ethical commitment, and internalized integrity. This framework bridges the apparent dichotomy between obedience and learner freedom, providing practical guidelines for policymakers, teacher training institutes, and PAI teachers. The study affirms that reasoned obedience underpins responsible independence, ensuring that freedom in learning becomes purposeful, ethical, and sustainable.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis integrasi prinsip pedagogis Islam Sami'na wa Atho'na ("kami mendengar dan kami taat") dengan Kurikulum Merdeka Belajar untuk memperkuat pendidikan karakter dalam kerangka Profil Pelajar Pancasila. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian terdiri dari tiga tahap: telaah pustaka teologis atas sumber Al-Qur'an dan karya klasik untuk memetakan spektrum Sami'na wa Atho'na melampaui ketaatan pasif; studi lapangan etnografis di pesantren, madrasah, dan sekolah Islam untuk mengidentifikasi manifestasi dan distorsi pedagogis; serta sintesis triangulasi yang diverifikasi pakar melalui diskusi kelompok terfokus. Temuan merekonseptualisasi Sami'na wa Atho'na sebagai "ketaatan tercerahkan," meta-kompetensi yang menjadi fondasi otonomi disiplin, komitmen etis, dan integritas internal. Kerangka ini menjembatani dikotomi ketaatan dan kebebasan belajar, serta menyediakan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga pelatihan guru, dan guru PAI. Penelitian menegaskan bahwa ketaatan beralasan menopang kemerdekaan yang bertanggung jawab, sehingga kebebasan belajar menjadi bermakna, etis, dan berkelanjutan.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan karakter telah mengemuka sebagai sebuah isu global yang krusial, di mana berbagai sistem pendidikan di seluruh dunia berupaya untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam menghadapi tantangan Abad ke-21, penekanan tidak lagi hanya pada penguasaan kognitif, melainkan pada pengembangan individu secara holistik yang mampu menavigasi kompleksitas dunia modern dengan landasan etis yang kuat [1]. Di Indonesia, urgensi ini direspons secara strategis melalui serangkaian reformasi kebijakan pendidikan, yang berpuncak pada peluncuran Kurikulum Merdeka.

Kebijakan Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai respons nasional untuk mengatasi berbagai tantangan kontemporer, termasuk potensi kehilangan pembelajaran (*learning loss*) dan kebutuhan mendesak untuk membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 [2]. Kurikulum ini dirancang dengan prinsip-prinsip inti yang mengedepankan fleksibilitas, fokus pada materi esensial, serta memberikan otonomi yang lebih besar kepada siswa dan satuan Pendidikan [3]. Salah satu pilar fundamental dari kurikulum ini adalah penekanannya yang kuat pada pengembangan karakter, yang dirumuskan secara komprehensif dalam kerangka Profil Pelajar Pancasila.

Profil Pelajar Pancasila berfungsi sebagai visi karakter bangsa dan referensi utama yang menerjemahkan tujuan pendidikan nasional ke dalam serangkaian kompetensi yang terukur. Profil ini tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dimensi pertamanya, "Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia," menjadi jangkar spiritual dan moral bagi keseluruhan kerangka, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam lima elemen akhlak: akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, dan bernegara [4]. Dimensi ini menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan nasional adalah melahirkan individu yang utuh, yang hubungan vertikalnya dengan Tuhan termanifestasi dalam hubungan horizontal yang harmonis dengan sesama dan alam semesta.

Namun, di tengah gelombang modernisasi kurikulum yang berpusat pada otonomi dan pemikiran kritis ini, muncul sebuah ketegangan paradigmatis yang signifikan ketika dihadapkan pada tradisi pendidikan Islam yang telah mengakar kuat di Indonesia. Dalam tradisi ini, salah satu prinsip pedagogis fundamental adalah *Sami'na wa Atho'na* ("kami

mendengar dan kami taat"). Prinsip ini secara historis menjadi landasan etos belajar, yang menekankan pentingnya adab, rasa hormat, dan kepatuhan siswa terhadap guru (*kiai* atau *ustaz*) sebagai jalan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berkah.¹¹ Pada tataran permukaan, prinsip yang menekankan "ketaatan" ini tampak berbenturan secara diametral dengan pedagogi "kemerdekaan" yang diusung oleh Kurikulum Merdeka. Paradoks ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Bagaimana konsep yang menekankan kepatuhan dapat diselaraskan dengan pedagogi yang mempromosikan otonomi?

Ketegangan ini bukan sekadar perdebatan teoretis atau akademis, melainkan sebuah tantangan implementasi yang nyata dan mendesak di tingkat akar rumput. Ribuan institusi pendidikan Islam mulai dari *pesantren*, *madrasah*, hingga sekolah Islam terpadu diwajibkan untuk mengadopsi kurikulum nasional yang kerangka filosofisnya, pada pandangan pertama, tampak berlawanan dengan etos pedagogis inti mereka. Kegagalan untuk menyediakan sebuah kerangka konseptual yang koheren untuk menjembatani kedua paradigma ini berisiko menimbulkan salah satu dari tiga dampak negatif. Pertama, kepatuhan yang dangkal terhadap kurikulum nasional, di mana praktik-praktik pedagogi otoriter tetap berjalan di balik layar sebagai "kurikulum tersembunyi". Kedua, kebingungan dan implementasi yang tidak efektif oleh para pendidik yang kesulitan merekonsiliasi dua tuntutan yang tampaknya kontradiktif. Ketiga, penolakan terhadap semangat Kurikulum Merdeka demi mempertahankan metode tradisional yang dianggap lebih otentik. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting bukan hanya sebagai sebuah latihan intelektual, tetapi sebagai sebuah intervensi yang diperlukan untuk membangun jembatan konseptual, memastikan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai tanpa mengikis atau mendelegitimasi nilai-nilai fundamental yang menopang segmen signifikan dari lanskap pendidikan di Indonesia.

Kajian literatur yang komprehensif menunjukkan adanya diskursus yang mendalam mengenai konsep ketaatan dalam Islam dan tantangan implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum modern. Namun, kedua alur diskusi ini seringkali berjalan secara paralel tanpa adanya titik temu yang memadai.

Analisis terhadap wacana Islam klasik dan kontemporer mengungkapkan bahwa pemaknaan *Sami'na wa Atho'na* sebagai kepatuhan pasif merupakan sebuah penyederhanaan yang berlebihan. Akar teologis konsep ini, yang ditemukan dalam Al-Qur'an seperti Surah An-Nur: 51 dan Al-Baqarah: 285, tidak merujuk pada penyerahan diri yang buta, melainkan pada sebuah komitmen iman yang sadar dan mendalam, yang

harus diikuti dengan tindakan nyata sebagai manifestasi dari keyakinan tersebut. Ungkapan ini juga merepresentasikan keseimbangan esensial antara proses pencarian ilmu (*sami'na*) dan pengamalannya (*atho'na*), di mana keduanya harus berjalan seiring untuk mencapai kesempurnaan iman.

Lebih jauh, tradisi intelektual Islam secara fundamental tidak pernah memisahkan antara iman dan akal (*'aql*). Akal tidak dipandang sekadar sebagai daya pikir logis, melainkan sebagai "cahaya spiritual" yang memungkinkan manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Al-Qur'an sendiri berulang kali mendorong manusia untuk berpikir (*tafakkarun*), merenung (*tadabbarun*), dan menggunakan akal, serta menuntut bukti atas setiap klaim kebenaran. Para filsuf Muslim klasik seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina bahkan memandang wahyu dan filsafat sebagai dua jalan komplementer menuju kebenaran yang sama [5]. Dalam konteks ini, *Sami'na wa Atho'na* tidak dapat dipahami sebagai titik akhir dari proses berpikir, melainkan sebagai titik awal sebuah deklarasi kesiapan untuk terlibat secara sadar dalam sebuah perjalanan intelektual dan spiritual.

Dalam tradisi fikih, wacana mengenai ketaatan ditempatkan dalam spektrum antara *taqlid* (mengikuti otoritas) dan *ijtihad* (penalaran independen). Para ulama membedakan antara *taqlid mahmud* (terpuji), yaitu sikap seorang pemula yang mengikuti pandangan ahli karena belum memiliki perangkat keilmuan, dengan *taqlid madzmum* (tercela), yaitu fanatisme buta yang menolak bukti kebenaran. Tujuan ideal dari pendidikan Islam adalah untuk membimbing siswa secara bertahap di sepanjang spektrum ini, dari kepatuhan yang beralasan menuju kapasitas untuk bernalar secara mandiri.

Meskipun demikian, mengakui bahwa konsep ini rentan terhadap distorsi yang dapat melegitimasi pedagogi otoriter. Namun, tradisi Islam sendiri menyediakan "katup pengaman" atau mekanisme korektif yang krusial. Prinsip yang berakar dari hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa "sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang *ma'ruf* (baik dan benar)". Prinsip ketaatan bersyarat ini menegaskan bahwa kepatuhan kepada otoritas manapun baik guru, orang tua, maupun pemimpin memiliki batas yang jelas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan kebenaran wahyu dan akal sehat. Hal ini meletakkan dasar bagi konsep "kepatuhan kritis" (*critical compliance*) sebagai sebuah prinsip yang otentik dalam Islam.

Di sisi lain, literatur mengenai pendidikan nasional menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih relevan,

partisipatif, dan berpusat pada siswa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga adaptif dan memiliki karakter kuat sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Namun, berbagai studi mengenai implementasinya menyoroti sejumlah tantangan signifikan. Tantangan ini mencakup kebutuhan akan perubahan *mindset* yang fundamental di kalangan pendidik dari seorang pengajar menjadi fasilitator keterbatasan sumber daya, serta kesulitan dalam menerjemahkan nilai-nilai karakter yang abstrak ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari yang konkret dan bermakna. Studi Darmayanti dkk menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan karakter tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan strategi yang disengaja, model keteladanan yang konsisten dari guru, dan budaya sekolah yang mendukung secara holistik [3]. Beberapa studi kasus yang spesifik bahkan menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka yang efektif, dengan memberikan otonomi dan tanggung jawab lebih kepada siswa, terbukti dapat menumbuhkan karakter disiplin dan kemandirian [2].

Analisis terhadap kedua rumpun literatur ini menyingkapkan adanya sebuah bifurkasi atau keterpisahan wacana. Studi Aini dkk melakukan analisis mendalam terhadap konsep-konsep teologis-pedagogis seperti *Sami'na wa Atho'na*, seringkali dalam konteks institusi pendidikan Islam tradisional. Sementara itu, para peneliti kebijakan pendidikan umum berfokus pada aspek teknis, manajerial, dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks sekolah negeri secara umum [6]. Sangat sedikit penelitian yang berupaya membangun jembatan teoretis yang kokoh antara dua diskursus yang berjalan paralel ini. Literatur studi Islam belum cukup terlibat dengan kerangka dan terminologi spesifik dari Profil Pelajar Pancasila, sementara literatur pendidikan umum cenderung mengabaikan tradisi teologis dan pedagogis mendalam yang membentuk praktik di lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kosong *the missing middle* yang hendak diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan menggunakan bahasa dari kedua tradisi untuk menciptakan sebuah kerangka sintesis yang saling memperkaya dan dapat dipahami bersama.

Kesenjangan yang teridentifikasi dalam kajian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus akademis cenderung menempatkan "ketaatan" dan "kemerdekaan" dalam sebuah kerangka oposisi biner. Penelitian sebelumnya seringkali menganalisis *Sami'na wa Atho'na* dalam paradigma tradisional yang terpisah dari kebijakan pendidikan kontemporer, atau sebaliknya, membahas Kurikulum Merdeka dari perspektif sekuler-

nasionalis yang kurang mempertimbangkan realitas teologis-pedagogis di lembaga pendidikan Islam. Artikel ini berargumen bahwa dikotomi semacam ini tidak hanya kontra-produktif, tetapi juga keliru dalam merepresentasikan potensi dinamis dari kedua konsep tersebut.

Tesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa konsep *Sami'na wa Atho'na*, ketika direvitalisasi dan ditafsirkan kembali sebagai "ketaatan yang tercerahkan" (*enlightened obedience*) atau "keterlibatan yang berkomitmen" (*committed engagement*), bukanlah merupakan antitesis dari otonomi siswa, melainkan justru menjadi fondasi etisnya yang esensial. Ketaatan yang sejati dalam Islam bukanlah kepatuhan mekanis, melainkan sebuah komitmen yang lahir dari pemahaman dan kesadaran, yang pada gilirannya menumbuhkan disiplin internal sebagai prasyarat mutlak untuk meraih kebebasan yang bertanggung jawab.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada perumusan sebuah kerangka kerja teoretis-pedagogis baru yang secara eksplisit menyintesis kedua konsep tersebut. Kerangka kerja ini memposisikan *Sami'na wa Atho'na* bukan sebagai konten materi ajar semata, melainkan sebagai sebuah "meta-kompetensi" yakni, prasyarat karakter fundamental yang memungkinkan keberhasilan implementasi pedagogi Merdeka Belajar. Konsep ini menumbuhkan disiplin, integritas, dan rasa tanggung jawab internal yang mutlak diperlukan agar siswa dapat menggunakan kemerdekaan mereka secara produktif, etis, dan bermakna. Tanpa fondasi karakter ini, "kemerdekaan" yang diberikan berisiko besar untuk terdegradasi menjadi anarki yang tidak terarah dan kontra-produktif.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama:

- a. Bagaimana spektrum makna teologis dan filosofis dari *Sami'na wa Atho'na* dalam tradisi intelektual Islam melampaui interpretasi kepatuhan pasif?
- b. Bagaimana konsep ini dimanifestasikan dan dinegosiasikan dalam praktik pedagogis di lembaga pendidikan Islam, baik tradisional maupun modern, termasuk potensi distorsinya?
- c. Bagaimana *Sami'na wa Atho'na* dapat disintesis secara pedagogis dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila tanpa menimbulkan kontradiksi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tiga tahap utama. Pertama, kajian teologis dilakukan melalui telaah pustaka kritis atas teks Al-Qur'an, hadis, serta karya klasik dan kontemporer ulama termasuk tafsir, fikih, dan filsafat Islam untuk memetakan spektrum makna *Sami'na wa Atho'na* dan mendefinisikan kerangka teoretisnya. Kedua, studi lapangan di lingkungan pesantren tradisional, madrasah modern, dan sekolah Islam terpadu dilakukan melalui wawancara mendalam dengan guru PAI, kiai, dan santri, serta observasi partisipatif terhadap praktik pedagogis sehari-hari; data ini dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi manifestasi, tantangan, dan distorsi konsep ketaatan dalam konstelasi otonomi belajar. Ketiga, sintesis pedagogis dikembangkan dengan cara triangulasi antara temuan teoretis dan empiris, kemudian diverifikasi melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama pakar pendidikan Islam dan pembuat kebijakan di Kemendikbudristek dan Kemenag, untuk merumuskan kerangka kerja integratif yang menyinergikan *Sami'na wa Atho'na* dengan prinsip Kurikulum Merdeka Belajar dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Fondasi Teologis dan Spektrum Makna Sami'na wa Atho'na

Konsep *Sami'na wa Atho'na* berakar kuat dalam Al-Qur'an, yang menggambarkannya sebagai ciri khas orang-orang beriman. Dalam Surah An-Nur: 51, Allah SWT menegaskan bahwa ucapan kaum mukmin ketika diseru kepada-Nya dan Rasul-Nya hanyalah, "Kami mendengar dan kami taat." Ayat ini, menurut tafsir Quraish Shihab, tidak hanya menunjukkan kepatuhan, tetapi juga komitmen iman yang harus diikuti dengan tindakan nyata sebagai jalan menuju keberuntungan (*al-muflihun*). Demikian pula dalam Surah Al-Baqarah: 285, ungkapan ini disandingkan dengan permohonan ampunan (*ghufrana*), yang mengisyaratkan bahwa ketaatan manusia selalu diiringi kesadaran akan keterbatasan dan kebutuhan akan rahmat ilahi, bukan sebuah kepatuhan mekanis yang sempurna. Konsep ini juga diperluas untuk mencakup ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin), seperti yang termaktub dalam Surah An-Nisa: 59. Namun, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, ketaatan ini tidaklah mutlak, melainkan bersyarat pada kepatuhan pemimpin itu sendiri kepada Allah dan Rasul-Nya [7].

Tradisi intelektual Islam secara fundamental tidak memisahkan antara iman dan akal. Akal (*'aql*) dipandang bukan sekadar sebagai daya pikir, melainkan sebagai "cahaya

spiritual" yang memungkinkan manusia membedakan antara yang baik dan yang buruk. Al-Qur'an sendiri berulang kali mendorong manusia untuk berpikir (*tafakkarun*), merenung (*tadabbarun*), dan menggunakan akal (*ta'qilun*), serta menuntut bukti atas setiap klaim kebenaran [8]. Para filsuf Muslim klasik bahkan melihat wahyu (*revelation*) dan hikmah (*hikmah* atau filsafat) sebagai dua jalan menuju kebenaran (*al-haqiqah*) yang sama, di mana keduanya berasal dari sumber Ilahi [9].

Dalam konteks ini, *Sami'na wa Atho'na* tidak dapat dipahami sebagai penyerahan diri yang mematikan akal. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali memperingatkan bahwa ketaatan tanpa pemahaman yang mendalam dapat menjerumuskan seseorang ke dalam *taqlid* buta, sebuah praktik yang tidak dianjurkan. Cendekiawan kontemporer Tariq Ramadan menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara iman dan pertanyaan; sebaliknya, "pertanyaan yang mendalam dapat memungkinkan kita untuk memiliki iman yang mendalam" [10].

Dengan demikian, *Sami'na wa Atho'na* dapat direkonseptualisasi bukan sebagai titik akhir dari proses berpikir, melainkan sebagai titik awal. Ia adalah sebuah komitmen sadar untuk "mendengarkan" ajaran dengan saksama dan "menaati" proses pendidikan yang dirancang untuk membimbing menuju pemahaman yang lebih dalam dan kapasitas berpikir kritis. Ini adalah sebuah deklarasi kesiapan untuk memulai perjalanan intelektual dan spiritual, bukan untuk mengakhirinya.

Pemahaman terhadap *Sami'na wa Atho'na* menjadi lebih jernih ketika ditempatkan dalam spektrum antara *taqlid* (mengikuti otoritas) dan *ijtihad* (penalaran independen). Tradisi fikih Islam membedakan antara dua jenis *taqlid*: *taqlid* yang terpuji (*mahmud*) dan *taqlid* yang tercela (*madzmum*) [10].

Taqlid terpuji adalah sikap seorang pemula atau non-spesialis yang mengikuti pandangan ulama yang diakui karena ia belum memiliki perangkat keilmuan untuk menganalisis dalil secara mandiri. Ini adalah langkah awal yang niscaya dalam setiap proses pembelajaran. Sebaliknya, *taqlid* yang tercela adalah fanatisme buta terhadap seorang tokoh atau mazhab, bahkan ketika bukti yang jelas bertentangan dengan pandangan tersebut.

Secara historis, gagasan tentang "tertutupnya pintu *ijtihad*" pada sekitar abad ke-10 Masehi berkontribusi pada pergeseran dari semangat inkuiri intelektual menuju imitasi, yang pada akhirnya menyebabkan stagnasi dalam pemikiran Islam. Para pembaru Muslim modern, dari Shah Waliullah hingga Muhammad Abduh, menyerukan pembukaan

kembali pintu *ijtihad* sebagai syarat kebangkitan peradaban. Dari perspektif pedagogis, tujuan pendidikan Islam idealnya adalah memandu siswa secara bertahap di sepanjang spektrum ini dari *taqlid* yang terpuji dan beralasan, menuju pengembangan kapasitas untuk melakukan *ijtihad* sesuai dengan tingkat kematangan intelektual dan spiritual mereka.

2. Manifestasi Pedagogis dan Tantangan Kontemporer

Dalam konteks pendidikan Islam tradisional, khususnya di lingkungan *pesantren salaf*, konsep *Sami'na wa Atho'na* termanifestasi dalam hubungan antara santri dan *kiai*. *Kiai* tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur otoritas karismatik dan teladan moral (*uswah hasanah*) yang menjadi pusat dari seluruh proses pendidikan. Budaya kepatuhan total kepada *kiai* dipandang sebagai jalan untuk memperoleh keberkahan (*barakah*) ilmu [11]. Model pedagogis ini terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai fundamental seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan etika dalam diri santri, yang pada gilirannya membentuk karakter yang kuat dan tangguh.

Meskipun memiliki keunggulan, model kepatuhan ini rentan terhadap distorsi. Ketika *Sami'na wa Atho'na* ditafsirkan secara absolut dan tanpa batas, ia dapat menjadi alat untuk melegitimasi pedagogi otoriter yang menekan pemikiran kritis dan menuntut kepatuhan buta [12]. Praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan semangat intelektualisme Islam, tetapi juga mengabaikan prinsip fundamental dalam tradisi Islam itu sendiri, yaitu ketaatan bersyarat.

Tradisi Islam menyediakan "katup pengaman" pedagogis yang krusial. Sebuah hadis yang diriwayatkan secara luas menceritakan tentang seorang komandan pasukan yang dalam suasana bercanda memerintahkan tentaranya untuk masuk ke dalam api. Para prajurit menolak, dan ketika dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau membenarkan tindakan mereka seraya bersabda, "Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang *ma'ruf* (baik dan benar)" [13]. Prinsip ini, yang juga berlaku dalam teologi politik Islam di mana ketaatan kepada penguasa gugur jika ia memerintahkan kemaksiatan, seharusnya menjadi komponen inti dari setiap pedagogi yang berbasis *Sami'na wa Atho'na* [7]. Pendidik harus secara eksplisit mengajarkan kepada siswa bahwa ketaatan mereka kepada otoritas baik itu guru, orang tua, maupun pemimpin memiliki batas yang jelas: kebenaran wahyu dan akal sehat. Ini mengubah dinamika dari kepatuhan buta menjadi kepatuhan kritis (*critical compliance*), sebuah proses yang secara inheren justru menumbuhkan dan menuntut pemikiran kritis.

Implementasi konsep *Sami'na wa Atho'na* dalam pendidikan karakter seringkali tidak netral gender. Secara teoretis, konsep ini berlaku universal bagi seluruh Muslim. Namun, dalam praktiknya, terutama dalam wacana keluarga dan sosial, penekanan pada ketaatan (*ta'ah*) secara tidak proporsional lebih sering ditujukan kepada perempuan dalam hubungannya dengan suami. Tafsir klasik terhadap ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisa': 34 sering kali menempatkan ketaatan istri sebagai inti dari kesalehan perempuan, yang berpotensi memperkuat struktur sosial yang patriarkal [14].

Bias ini meresap ke dalam materi pendidikan formal. Analisis konten terhadap buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia menunjukkan adanya pola yang konsisten di mana karakter laki-laki digambarkan dominan dalam peran-peran religius dan sosial di ruang publik, sementara karakter perempuan cenderung ditampilkan dalam peran pasif dan domestik [15]. Hal ini menciptakan sebuah "kurikulum tersembunyi" yang mengajarkan versi ketaatan yang berbeda untuk siswa laki-laki dan perempuan. Menghadapi hal ini, perspektif feminis Muslim dan interpretasi kontemporer berupaya membongkar ulang ketaatan bukan sebagai subordinasi, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral pribadi dan agensi spiritual perempuan. Oleh karena itu, sebuah pedagogi ketaatan yang adil dan memberdayakan harus secara kritis membongkar bias gender ini dan mempromosikan agensi serta tanggung jawab moral yang setara bagi seluruh siswa, tanpa memandang jenis kelamin [16].

3. Sami'na wa Atho'na dalam Konteks Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip-prinsip utama seperti fleksibilitas, fokus pada materi esensial, pembelajaran berbasis proyek, serta pengembangan kompetensi dan karakter siswa secara holistik. Pada pandangan pertama, prinsip ini tampak berlawanan dengan ketaatan. Namun, melalui sintesis yang lebih mendalam, keduanya dapat saling menguatkan [17].

Merdeka Belajar menuntut siswa untuk memiliki otonomi, kemandirian, dan kemampuan untuk mengatur proses belajarnya sendiri. Keterampilan ini tidak muncul dalam ruang hampa; ia memerlukan fondasi karakter yang kuat, yaitu disiplin untuk mengikuti aturan main, tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, dan integritas untuk bertindak sesuai dengan komitmen.

Di sinilah *Sami'na wa Atho'na* menemukan relevansi barunya. Konsep ini dapat diposisikan bukan sebagai konten PAI semata, tetapi sebagai "meta-kompetensi" atau prasyarat karakter yang memungkinkan keberhasilan pedagogi *Merdeka Belajar*. *Sami'na*

wa Atho'na dapat diinterpretasikan sebagai komitmen awal siswa untuk "mendengar" arahan dan bimbingan fasilitator (guru) dan "menaati" proses serta aturan belajar yang telah disepakati bersama. Tanpa adanya "ketaatan" pada kerangka kerja dan etos belajar ini, "kemerdekaan" yang diberikan berisiko menjadi anarki yang tidak terarah dan tidak produktif. Dengan demikian, ketaatan yang beralasan menjadi fondasi bagi kemerdekaan yang bertanggung jawab.

Sinergi antara *Sami'na wa Atho'na* dan Kurikulum Merdeka menjadi sangat jelas ketika dihubungkan dengan dimensi pertama Profil Pelajar Pancasila, yaitu "Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia". Dimensi ini dijabarkan ke dalam lima elemen kunci: (a) akhlak beragama, (b) akhlak pribadi, (c) akhlak kepada manusia, (d) akhlak kepada alam, dan (e) akhlak bernegara.

Konsep *Sami'na wa Atho'na* mendengar dan menaati perintah Tuhan untuk beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia secara langsung menjadi landasan spiritual dan motivasi tertinggi bagi pencapaian seluruh elemen tersebut. Ketaatan kepada Tuhan menjadi pendorong internal untuk mempraktikkan kejujuran (akhlak pribadi), menghargai perbedaan dan berempati (akhlak kepada manusia), menjaga kelestarian lingkungan (akhlak kepada alam), dan menjadi warga negara yang baik [18]. Dengan demikian, *Sami'na wa Atho'na* tidak hanya relevan untuk pendidikan agama dalam arti sempit, tetapi juga berfungsi sebagai ruh yang menghidupkan tujuan pendidikan karakter nasional.

Implementasi sintesis ini di lapangan tidaklah mudah. Guru PAI menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, mulai dari perubahan *mindset* dari pengajar menjadi fasilitator, kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan sarana, hingga adaptasi siswa terhadap model pembelajaran baru [19]. Terdapat pula tantangan spesifik dalam memadukan nilai-nilai Islam yang luhur dengan pendekatan kebebasan belajar agar tetap relevan dalam konteks modern tanpa kehilangan otentisitasnya [20].

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diimplementasikan:

- a. Pelatihan Guru: Lembaga pelatihan guru perlu fokus pada pengembangan pedagogi berbasis nilai (*value-based pedagogy*) yang terintegrasi dengan metode pembelajaran interaktif seperti *Project-Based Learning* (PBL) dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus dilatih untuk menjadi teladan (*role model*) yang mampu menunjukkan ketaatan yang kritis dan dialogis, bukan

otoriter.

- b. Pengembangan Kurikulum Kontekstual: Guru PAI didorong untuk memiliki otonomi dalam memilih materi esensial yang paling relevan dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Materi tersebut kemudian diintegrasikan dengan isu-isu kontemporer, mendorong siswa untuk menggunakan nilai-nilai Islam sebagai kerangka berpikir dalam memecahkan masalah nyata.
- c. Kolaborasi Ekosistem Pendidikan: Keberhasilan pendidikan karakter memerlukan sinergi. Perlu ada penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai ketaatan yang bertanggung jawab dan otonomi yang beretika.

4. Pendidikan Karakter Islam dan *Social-Emotional Learning* (SEL)

Untuk memperkaya analisis, perbandingan dengan kerangka kerja pendidikan karakter sekuler yang berbasis bukti, yaitu *Social-Emotional Learning* (SEL), menjadi relevan. SEL didefinisikan sebagai proses pengembangan lima kompetensi inti: kesadaran diri (*self-awareness*), manajemen diri (*self-management*), kesadaran sosial (*social awareness*), keterampilan berelasi (*relationship skills*), dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (*responsible decision-making*). Ketika dibandingkan dengan tujuan pendidikan karakter dalam Islam yang dikenal dengan istilah *Tarbiyah*, *Ta'dib*, dan pembentukan *Akhlaq* terdapat tumpang tindih konseptual yang signifikan [21].

Kompetensi *self-awareness* dan *self-management* dalam SEL beresonansi kuat dengan konsep *muhasabah* (introspeksi diri), *mujahadah* (pengendalian diri), kesabaran, dan kejujuran dalam Islam [22]. *Social awareness* sejajar dengan nilai empati, kasih sayang (*rahmah*), dan kepedulian sosial. *Relationship skills* tercermin dalam anjuran untuk menjaga *silaturahmi*, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik secara damai. Terakhir, *responsible decision-making* adalah manifestasi dari konsep *amanah* (amanah), keadilan, dan rasa pertanggungjawaban di hadapan Tuhan [23].

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kerangka kerja Islam memberikan nilai tambah yang unik pada SEL. Islam menyediakan landasan teologis dan motivasi spiritual (*lillahi ta'ala*) yang mendalam bagi pengembangan keterampilan sosial-emosional. Pertanyaan "mengapa saya harus berempati?" dijawab bukan hanya dengan alasan pragmatis (agar hubungan sosial lebih baik), tetapi juga karena ia adalah bagian dari ibadah dan manifestasi dari meneladani sifat Tuhan Yang Maha Pengasih [22]. Sebaliknya,

SEL memberikan bahasa psikologi modern, struktur pedagogis, dan perangkat asesmen yang berbasis bukti (*evidence-based*) yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi program *Tarbiyah* di sekolah-sekolah Islam secara lebih sistematis dan terukur.⁶⁵ Dengan demikian, SEL dapat dipandang sebagai "terjemahan operasional" atau "instrumentasi psikologis" dari konsep luhur *akhlaq al-karimah* (akhlak mulia), yang menjembatani wacana teologi Islam dengan psikologi pendidikan kontemporer.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Pedagogis

Aspek Pedagogis	Pedagogi Islam Tradisional (Berbasis Sami'na wa Atho'na)	Pedagogi Kurikulum Merdeka Belajar	Kerangka <i>Social-Emotional Learning</i> (SEL)
Prinsip Inti	Ketaatan (<i>ta'ah</i>), adab, transmisi pengetahuan dan berkah (<i>barakah</i>) dari guru ke murid.	Otonomi siswa, pembelajaran berbasis proyek, pemikiran kritis, relevansi kontekstual.	Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Peran Guru	Teladan moral (<i>uswah hasanah</i>), sumber otoritatif, pembimbing spiritual (<i>mursyid</i>).	Fasilitator, mitra belajar, desainer pengalaman belajar, pendorong refleksi siswa.	Pelatih, fasilitator, pencipta lingkungan belajar yang aman secara psikologis, model perilaku pro-sosial.
Agensi Siswa	Reseptif, peniru teladan, pencari ilmu dengan kerendahan hati (<i>tawadhu'</i>) untuk meraih keberkahan.	Aktif, inisiator, kolaborator, reflektif, bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri.	Partisipan aktif dalam pengembangan keterampilan intrapersonal & interpersonal melalui latihan dan refleksi.
Tujuan Akhir	Pembentukan karakter berakhlak mulia (<i>akhlaq al-karimah</i>), menjadi	Terwujudnya Profil Pelajar Pancasila, menjadi pembelajar sepanjang hayat yang	Individu yang cerdas secara emosional dan sosial, mampu membangun hubungan positif dan

insan kamil yang
taat kepada Allah.

kompeten dan
adaptif.

membuat keputusan
yang etis.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi praktis diajukan:

- a. Untuk Pembuat Kebijakan: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) perlu mengembangkan panduan teknis tentang cara mengintegrasikan nilai-nilai spiritual fundamental seperti *Sami'na wa Atho'na* ke dalam kerangka Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) secara inklusif, kritis, dan non-dogmatis.
- b. Untuk Lembaga Pelatihan Guru (LPTK): Merancang dan mengimplementasikan modul pelatihan khusus bagi calon guru PAI yang secara eksplisit membahas pedagogi untuk menyeimbangkan ketaatan dan otonomi. Modul ini dapat menggunakan metode studi kasus, permainan peran (*role-playing*), dan integrasi kerangka SEL untuk membekali guru dengan keterampilan praktis.
- c. Untuk Guru PAI: Menerapkan "pedagogi ketaatan kritis" di dalam kelas. Guru hendaknya tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga mendorong siswa untuk bertanya "mengapa" di balik sebuah aturan, memahami hikmah di balik perintah, dan belajar membedakan antara ketaatan yang membangun dan kepatuhan yang merusak. Hadis tentang ketaatan bersyarat dapat dijadikan sebagai materi ajar kunci untuk diskusi ini.
- d. Untuk Peneliti Selanjutnya: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji kerangka teoretis ini di lapangan. Penelitian empiris kualitatif di sekolah-sekolah penggerak dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana guru PAI menegosiasikan konsep ketaatan dan otonomi dalam praktik kelas sehari-hari. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dirancang untuk mengukur dampak dari pendekatan terpadu ini terhadap perkembangan karakter dan kompetensi siswa.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan kembali tesis utamanya bahwa konsep *Sami'na wa Atho'na*, jika dipahami secara dinamis sebagai "ketaatan yang tercerahkan" (*enlightened obedience*) atau "keterlibatan yang berkomitmen" (*committed engagement*), bukan merupakan penghalang, melainkan justru aset berharga bagi pendidikan karakter di era Kurikulum Merdeka Belajar. Ia menyediakan fondasi disiplin, tanggung jawab, dan integritas yang diperlukan agar "kemerdekaan" yang diberikan kepada siswa menjadi kemerdekaan yang bermakna, produktif, dan beretika.

Secara teoretis, artikel ini mendorong pergeseran wacana dalam filsafat pendidikan Islam dari polarisasi dikotomis antara ketaatan versus kebebasan, menuju sebuah model dialektis di mana kedua konsep tersebut saling mengandaikan dan menguatkan. Ketaatan yang beralasan adalah jalan menuju kebebasan yang sejati, dan kebebasan yang bertanggung jawab adalah buah dari ketaatan pada prinsip-prinsip kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. R. Saputra and N. Hilyatunisa, "Towards 13 Years of Compulsory Education: Strategies for Equitable Access to Quality Education in Indonesia," *J. Smart Pedagog. Educ.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–32, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.cerdaspedia.com/index.php/spedu/article/view/21>
- [2] M. Hasanah, N. Nurlaili, and A. Nasution, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Membentuk Karakter Siswa Pada Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)," *J. Prim. Educ.*, vol. 4, no. 2, pp. 42–52, Dec. 2024, doi: 10.29300/jpe.v4i2.7288.
- [3] A. Darmayanti, D. Y. Nugroho, and C. Atikah, "Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar," *J. Educ. Res.*, vol. 5, no. 3, pp. 2573–2581, Jul. 2024, doi: 10.37985/jer.v5i3.1018.
- [4] Hastangka and Lasiyo, "Profil Pelajar Pancasila: Code of Conducts, for Indonesian Students?," in *Proceedings of the 1st UPY International Conference on Education and Social Science (UPINCESS 2022)*, Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 119–131. doi: 10.2991/978-2-494069-39-8_11.
- [5] M. Rafi Alfazri, Intan Probowati, and Herlini Puspika Sari, "Konsep Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Islam Menurut Pemikiran Al-Farabi dan Relevansinya di Era Moderen," *Reflect. Islam. Educ. J.*, vol. 1, no. 4, pp. 140–153, Nov. 2024, doi: 10.61132/reflection.v1i4.186.
- [6] Q. Aini, A. Kurniawan, and T. Bina Sulistiyowati, "Digital Transformation: Best Practices of Educational Platform in Indonesia," *J. Transform.*, vol. 10, no. 1, pp. 42–59, Mar. 2024, doi: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.3.
- [7] W. Z. K. W. Ali, A. Z. Ismail, M. S. Shahrudin, and A. S. Gatara, "The Concept of Al-Ta'ah (Obedience) To Muslim Leadership From The Islamic Political Thought," *Polit. J. Ilmu Polit.*, vol. 3, no. 2, pp. 263–280, Sep. 2021, doi: 10.15575/politicon.v3i2.11947.

- [8] A. A. Dahari, A. Suhid, and F. Fakhrudin, "Implementation Critical Thinking in Teaching Islamic Education," *Int. J. Acad. Res. Progress. Educ. Dev.*, vol. 8, no. 4, pp. 805–823, Dec. 2019, doi: 10.6007/IJARPED/v8-i4/6756.
- [9] T. Abdel-Maguid and R. Abdel-Halim, "The Qur'ān and the development of rational thinking," *Urol. Ann.*, vol. 7, no. 2, pp. 135–140, 2015, doi: 10.4103/0974-7796.152926.
- [10] A. K. Abdullah, "Overcoming Taqlid in Muslim Institutions of Learning," *Islam Civilisational Renew.*, vol. 6, no. 1, pp. 43–57, Jan. 2015, doi: 10.12816/0009896.
- [11] N. Chasanah, "Leadership of Kiai and Students' Obedience in Islamic Boarding School," *Resolusi J. Sos. Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 42–52, 2021, doi: 10.32699/resolusi.v4i1.1875.
- [12] D. Iklila and A. Fauzi, "Relevansi Prinsip Pesantren Sami'na wa Atho'na dalam Filsafat Etika Immanuel Kant," *J. AL-AQIDAH*, vol. 16, no. 2, pp. 104–119, Dec. 2024, doi: 10.15548/ja.v16i2.7869.
- [13] B. Bakour, "Reconceptualizing Political Obedience in Islamic Thought," *Am. J. Islam Soc.*, vol. 42, no. 1–2, pp. 6–41, Jun. 2025, doi: 10.35632/ajis.v42i1-2.3428.
- [14] F. N. Izza, J. Jamilah, and Z. Sa'diyah, "RIGHTEOUS WOMEN AND SUBMISSION: Between Islamic Texts and Muslim Women's Perspectives," *Ulul Albab J. Stud. Islam*, vol. 26, no. 1, pp. 121–142, Jun. 2025, doi: 10.18860/ua.v26i1.28932.
- [15] N. A. Fitria, M. S. Arif, and A. Muhid, "Integration of Gender Equality in Islamic Education Curriculum: A Content Study on Elementary School Textbooks," *Scaffolding J. Pendidik. Islam dan Multikulturalisme*, vol. 7, no. 1, pp. 841–859, Jun. 2025, doi: 10.37680/scaffolding.v7i1.7294.
- [16] C. Alkouatli, M. Abdalla, N. Faris, and S. N. Hidayah, "Architects of change: female Islamic school leaders in Australia & New Zealand," *Int. J. Leadersh. Educ.*, pp. 1–30, Oct. 2023, doi: 10.1080/13603124.2023.2264257.
- [17] M. F. A. Nasir, "Integrasi Nilai Islami Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Pengajaran Ipa Sains Di Madrasah Ibtidaiyyah," *Al-Mubtadi J. Pendidik. Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, vol. 1, no. 2, pp. 71–91, May 2024, doi: 10.58988/almubtadi.v1i2.287.
- [18] A. Darmansyah and A. Susanti, "Pelaksanaan Profil Pelajar Pancasila Dimensi Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia di SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu," *J. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 9, no. 1, pp. 66–76, Jan. 2024, doi: 10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp66-76.
- [19] I. Wahyudi, N. Zakia, R. K. Anam, and A. Analistiani, "Tantangan dan Peluang Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyyah," *Tarqiyatuna J. Pendidik. Agama Islam dan Madrasah Ibtidaiyyah*, vol. 3, no. 2, pp. 97–105, Dec. 2024, doi: 10.36769/tarqiyatuna.v3i2.710.
- [20] A. Mufidah, R. Raharjo, and M. Mustopa, "Penanaman Kesadaran Sosial Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Implikasinya terhadap Perilaku Sosial Keagamaan," *J. Visi Ilmu Pendidik.*, vol. 16, no. 3, pp. 310–332, Jan. 2025, doi: 10.26418/jvip.v16i3.79041.
- [21] A. Sahin, "Critical Issues in Islamic Education Studies: Rethinking Islamic and Western Liberal Secular Values of Education," *Religions*, vol. 9, no. 11, p. 335, Oct. 2018, doi: 10.3390/rel9110335.
- [22] S. Ali, "Social and Emotional Learning: A Literature Review from Islamic

- Perspective,” *Curr. Perspect. Educ. Res.*, vol. 6, no. 1, pp. 54–62, Dec. 2023, doi: 10.46303/cuper.2023.6.
- [23] R. Kurniawan, I. K. Bakti, M. Firmansyah, R. Bahri, N. Kholis, and Kusaeri, “Islamic emotional-cognitive integration: how Islamic education shapes students’ cognitive processes and outcomes through expressive writing,” *Br. J. Relig. Educ.*, pp. 1–14, Jun. 2025, doi: 10.1080/01416200.2025.2523385.